



**Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi
Dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya
Berdasarkan Kearifan Lokal di Muaro Jambi**

Oleh:

Hapsa¹, Firmansyah Putra²

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

¹hapsa_cha@yahoo.co.id

Keywords:

*Government
Performance,
Cultural Heritage*

Abstract

This article describes the performance of the government, especially the Jambi provincial government in preserving cultural heritage objects. Jambi Province is one of the provinces that has a wealth of historical heritage, especially those scattered in Muaro Jambi Regency. Cultural heritage objects (BCB) are regional local assets which, if managed optimally, can brand the area with positive values and serve as educational tours that have an impact on regional income. So it is important to know the extent of the efforts made by the local government in maintaining and maximizing the preservation of cultural heritage objects. The method used is qualitative, to describe the findings in the field. The local government seeks to maximize performance both in terms of quantity, quality, and effectiveness in preserving BCB based on local wisdom by collecting data and conservation, archaeological exhibitions, ancient FGDs, ancient vlog competitions, technical guidance, and restoration. Not only concerned with economic interests alone (regional income) but more than that, namely maintaining historical heritage that can be passed on to the next generation, as evidence of civilization in the footsteps of Jambi Province.

Kata Kunci:

*Kinerja
Pemerintah,
Cagar Budaya*

Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang kinerja pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga kelestarian benda-benda cagar budaya. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kekayaan peninggalan sejarah khususnya yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Benda cagar budaya (BCB) merupakan kekayaan lokal daerah yang jika dikelola dengan maksimal mampu membrand daerah dengan nilai positif dan dijadikan sebagai wisata edukasi yang berimbas pada income daerah. Sehingga penting untuk diketahui, sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah

setempat dalam menjaga dan memaksimalkan pelestarian benda cagar budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, untuk mendeskripsikan temuan dilapangan. Pemerintah setempat berupaya memaksimalkan kinerja baik dalam hal kuantitas, kualitas, dan keefektifan dalam pelestarian BCB berbasis kearifan lokal dengan pendataan konservasi, pameran purbakala, FGD purbakala, lomba vlog purbakala, bimtek, dan pemugaran. Tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi semata (pendapatan daerah) tetapi lebih dari itu yaitu memelihara peninggalan sejarah yang dapat terwariskan sampai generasi selanjutnya, sebagai bukti peradaban jejak Provinsi Jambi.

Pendahuluan

Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak terlepas dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol identitas peradaban dari generasi ke generasi. Begitupun realita yang terjadi di Provinsi Jambi, tidak terlepas dari adanya peninggalan sejarah, baik yang berupa bangunan (candi, rumah-rumah tua, benteng pertahanan), artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya masa lalu yang merepresentasikan keluhuran dan ketinggian budaya masyarakat. Masyarakat Provinsi Jambi yang dikenal dengan kekentalan adat melayu memiliki peninggalan sejarah yang tersebar diberbagai kabupaten terkhusus di Kabupaten Muara Jambi yang telah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya (antarnews: 2018).

Beberapa bangunan kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi keistimewaan bagi masyarakat Jambi terutama benda-benda cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Muara Jambi, dimana keberadaannya diharapkan bagi masyarakat umum dan para wisatawan dapat belajar dari kekayaan budaya masa lalu untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan masa yang akan datang, serta diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Nasionalisme. Serta mampu mengambil nilai-nilai baik yang tersirat maupun yang tersurat dari setiap benda cagar budaya yang diwariskan, selain itu jika dikelola dengan maksimal mampu membrand daerah dengan nilai positif dan dijadikan sebagai wisata edukasi yang berimbas pada income daerah.

Namun tidak dipungkiri seiring dengan berkembangnya zaman lambat laun kearifan masyarakat yang bersahabat dengan alam mulai tergerus oleh teknologi dan kesenjangan ekonomi. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia dalam

bermasyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan saja berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi yang terpenting juga dengan budaya manusia. Hubungan erat antara manusia dan lingkungan kehidupan fisiknya itulah yang melahirkan budaya manusia. Budaya lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali. Waktu demi waktu kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok yang selalu mengubah alam. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Fenomena inipun di awal tahun 2012 sempat memberikan kekhawatiran bagi pemerhati cagar budaya di Kabupaten Muara Jambi, dimana perusahaan dan pabrik-pabrik yang beroperasi di sekitar candi muara jambi dari tahun 1980an, melakukan penebangan pohon yang tidak dapat dihindari, yang dikhawatirkan akan menghilangkan karakter cagar budaya tersebut (Tempo: 2019).

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang sesungguhnya telah berusaha melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Secara teori hukum, hal ini sangat kuat keberadaannya sebagai pelindung cagar budaya terhadap ancaman kerusakan dan ancaman yang berbentuk apapun, atas dasar ini penulis melihat pentingnya eksistensi dan peran pemerintah dalam hal ini Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi dalam memaksimalkan kinerja terhadap upaya pengelolaan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Muara Jambi dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Meleong: 2004) dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif, digunakan untuk menganalisis dan memaparkan dengan jelas temuan fakta-fakta dalam melihat bagaimana realitas kinerja BPCB Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan cagar budaya berbasis kearifan lokal di Kabupaten Muara Jambi. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi, dan peninjauan lokasi di Muara Jambi, alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini yaitu pertama; BPCB memiliki andil yang sangat besar terkait pelestarian cagar budaya di Provinsi Jambi termasuk Kabupaten Muara Jambi, kedua; Kabupaten Muara Jambi terdapat kekayaan cagar budaya yang tersebar di kawasan 3.000

hektar. Penentuan nara sumber menggunakan pendekatan *snowball* dimana kebutuhan peneliti sesuai dengan kebutuhan data yang diperoleh. Jika dirasa sudah memenuhi data yang diperoleh maka wawancara terhadap narasumber dicukupkan.

Hasil Dan Pembahasan

Kinerja individu staf atau karyawan menjadi point of view ketika suatu organisasi atau lembaga akan melakukan tindakan-tindakan yang strategis, termasuk dalam hal pelestarian benda cagar bdaya oleh BPCB Provinsi Jambi . Artinya bagaimana BPCB harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan apakah masing-masing staf BPCB sudah diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam pengelolaan benda-benda cagar budaya. Hasil analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan SDM secara optimum. Pada gilirannya kinerja individu atau staf BPCB Provinsi Jambi akan mencerminkan derajat kompetensi suatu BPCB itu sendiri dalam pengelolaan benda-benda cagr budaya. Tingkat keberhasilan staf BPCB secara keseluruhan selama periode tahun 2019 di dalam pelestarian benda cagar budaya menunjukkan arah perbaikan baik dilihat dari kualitas benda cagar budaya maupun kuantitas. Kewenangan pelestarian cagar budaya pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Secara teknis, kewenangan tersebut dijalankan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini terdapat 12 buah BP3 yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia dan sebagian besarnya memiliki wilayah kerja lebih dari dua provinsi termasuk Provinsi Jambi (Sugiharta: 2012).

Tabel 1:

Sebaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Indonesia

| No | Nama | Wilayah Kerja | Tahun Berdiri |
|----|-----------------|--|---------------|
| 1. | BP3 Aceh | NAD dan Sumatera Utara | 1989 |
| 2. | BP3 Batusangkar | Sumatera Barat, Riau, dan Kepri | 1989 |
| 3. | BP3 Jambi | Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung | 1989 |
| 4. | BP3 Serang | Banten, Jawa Barat DKI Jakarta, dan Lampung | 1989 |
| 5. | BP3 Jogja | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1989 |
| 6. | BP3 Jawa Tengah | Jawa Tengah | 1989 |
| 7. | BP3 Jawa Timur | Jawa Timur | 1989 |

Sumber: Supardi (2004: 184) dalam Sugiharta

Seiring dengan era otonomi daerah, banyak kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan ke pemerintah daerah, termasuk kewenangan pelestarian kebudayaan secara umum dan pelestarian cagar budaya secara khusus. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, maka semua urusan teknis di bidang pelestarian cagar budaya, dari hulu sampai hilir, juga menjadi kewenangan daerah otonom. Secara teoritis, pelimpahan kewenangan ini jelas memperingan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun demikian, disisi lain pada tahap pengimplementasian menjadikan pemerintah daerah setempat memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar, begitupun yang dirasakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah daerah setempat diberikan kewenangan yang lebih besar dalam proses pelestarian benda cagar budaya, sehingga hal ini menuntut pemerintah bersinergi dengan BPCB untuk terus berupaya menunjukkan dan meningkatkan kinerjanya dalam peneglolaan benda cagar budaya tersebut.

1. Kualitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi

Keahlian staf dan sumber daya manusia yang ada di BPCB Provinsi Jambi menjadi provider salah satu penentu keberhasilan lembaga tersebut dalam mengelola benda-benda cagar budaya. Langkah-langkah tersebut terus dilakukan mulai dari rekrutmen staf yang berbasis merit sistem kualitas dan profesionalisme personal, pemahaman terhadap budaya dan barang peninggalan sejarah. Pada tahun 2019 BPCB melakukan pembinaan kepada juru pelihara dan satpam situs cagar budaya yang ada di wilayah kerja BPCB Jambi. Peserta kegiatan terdiri dari Juru Pelihara dan Petugas Keamanan baik PNS maupun Non PNS dari seluruh wilayah kerja BPCB Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan juru pelihara terhadap situs-situs di wilayah kerja BPCB Jambi. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untukperbaikan kualitas sumber daya manusia dilingkungan BPCB Provinsin Jambi, kegiatan ini dilakukan sudah tiga kal, dan diharapkan menjadi program yang berjangka panjang terhadapkualitas SDM tersebut.

2. Kuantitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi

Peningkatan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdapat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, menjadi penunjang dalam pengelolaan benda cagar budaya tersebut. BPCB terus melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam membantu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi

keberlangsungan benda cagar budaya di Provinsi Jambi, termasuk pengadaan anggaran yang memadai dalam memperbaiki jumlah sarana dan prasarana yang berkualitas dan efektif di gunakan. Program pengadaan sarana dan prasarana tersebut ditahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.15.751.866, jumlah anggaran yang terbatas tersebut dikelola semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sarpras yang memadai dalam pengelolaan cagar budaya Provinsi Jambi yang dilestarikan termasuk cagar budaya yang dilindungi, cagar budaya yang dikembangkan, dan cagar budaya yang dimanfaatkan.

3. Ketetapan Waktu Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi

Fungsi utamanya dengan pelestarian benda cagar budaya bermanfaat bagi pendidikan, pelestarian kebudayaan, dan pariwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan peran langsung oleh masyarakat Jambi khususnya, sesuai dengan acuan visi BPCB tahun 2015-2019 dimana pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang Optimal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Peran Serta Masyarakat, hal ini yang belum maksimal dalam pencapaian target waktu yang menjadi rencana strategis BPCB. Ketahanan budaya dan kontribusi budaya ditengah peradaban dunia harus didukung dengan program-program yang mengarah pada kebebasan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya.

4. Efektifitas Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi

Terselenggaranya layanan BPCB dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola dibidang cagar budaya dan purbakala, merupakan salah satu fungsi dan sasaran efektif oleh BPCB Provinsi Jambi. usaha untuk mencapai tujuan hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan anggaran yang cukup terbatas, sehingga menjadi pekerjaan rumah BPCB untuk mewujudkan target-target yang strategis tersebut. Selanjutnya dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek pariwisata, terkadang memunculkan anggapan yang bersebrangan dengan pelestarian cagar budaya itu sendiri. Padahal sebenarnya pelestarian dan pemanfaatan memiliki sifat yang saling terkait guna memenuhi tujuan akhir dari pelestarian cagar budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini muncul dikarenakan cagar budaya juga memiliki batasan khusus dalam pemanfaatannya, tidak hanya melihat dari unsur ekstrinsik saja, melainkan dapat dimanfaatkan melalui nilai-nilai instrinsiknya, tanpa mengubah unsur

ekstrinsik dari cagar budaya itu sendiri. Prilaku masyarakat yang mampu mengsinergikan kedua unsur tersebut juga masih menjadi kendala bagi PBCB Provinsi Jambi.

5. Kemandirian Pengelolaan Benda Cagar Budaya Provinsi Jambi

BPCB yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan cagar budaya di Provinsi Jambi tentu harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan daerah wilayah kerja. Mandiri yang dimaksud disini BPCB menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja dengan program-program strategis mewujudkan pelestarian cagar budaya yang komprehensif dengan sinergisitas dengan semua stakeholders sesuai dengan renstar BPCB yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian benda-benda cagar budaya.

Selain meningkatkan kinerja, penataan kawasan juga perlu ditingkatkan dengan mempertahankan keaslian dan keasrian yang dimiliki oleh benda-benda bersejarah tersebut. Peningkatan kinerja dalam upaya-upaya pelestarian dan peningkatan mutu cagar budaya, memerlukan perlakuan yang berbeda dari kebijakan pemerintah lainnya, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disatu sisi harus tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga harus ada sinergisitas yang pas antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Peningkatan kinerja Benda Cagar Budaya baik dalam hal kuantitas, kualitas, dan keefektifan dalam pelestarian BCB berbasis kearifan lokal dilakukan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pendataan dan Konservasi Benda Cagar Budaya

Pendataan yang berkelanjutan dan rutin dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata dari pemerintah Provinsi Jambi khususnya Balai pelestarian cagar Budaya dalam peningkatan mutu kinerja, yang berimplikasi pada peningkatan mutu benda cagar budaya di Provinsi Jambi. Pendataan yang dilakukan pada awalnya oleh BPCB Provinsi Jambi, masih dilakukan dengan cara-cara manual, sehingga dirasa tidak maksimal dalam proses pendataan. Akan tetapi seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi dalam ranah pelayanan publik, termasuk pelayanan dalam pelestarian cagar budaya, untuk saat ini pendataan yang dilakukan secara rutin sudah menggunakan sistem input data secara online, sehingga dirasa jauh lebih efektif dan efisien mengelola cagar budaya agar jelas tupoksinya.

Pendataan benda cagar budaya menjadi sangat penting, melihat banyaknya permasalahan terkait kepemilikan benda cagar budaya itu sendiri, baik permasalahan yang bersifat horizontal maupun vertikal, misalnya kepemilikan benda cagar budaya yang saling klaim antara provinsi, candi bumi ayu misalnya yaitu antara Jambi dan Palembang, belum lagi saling klaim antara kepemilikan pribadi dengan pemerintah. Sehingga pendataan cagar budaya yang dilakukan selama ini bukan dimaksudkan untuk mengambil barang milik pribadi atau mengklaim milik daerah lain tapi untuk kejelasan bersama. Tujuannya agar pemerintah tahu bahwa barang itu ada tempat tersebut dan bisa melestarikan dan menjaga bersama-sama menjadi kekayaan budaya yang terlestarikan.

2. Branding Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya lebih sebagai sebuah simbol yang memiliki ragam makna ketimbang hanya sebagai benda mati semata. Selain BCB itu memiliki nilai sejarah dan kultural yang melekat pada dirinya, ia juga selalu dimaknai berbeda dari generasi ke generasi, karena pada hakekatnya BCB adalah sebuah warisan budaya. Akan tetapi disatu sisi benda cagar budaya jika dikelola dengan baik dan dengan perencanaan dan strategi yang tepat dapat menjadi sumber daya yang dapat mememberdayakan lingkungan sekitar. Kehadiran benda cagar budaya di provinsi Jambi bisa menyentuh ranah eksplor dibidang ekonomi dengan disandingkan dengan dunia pariwisata, akan tetapi jangan sampai melenceng menjadi eksploitasi kepentingan-kepentingan ekonomi semata yang tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan dan sejarahnya.

Berbagai cara dilakukan oleh semua stakeholders dalam memperkenalkan benda-benda cagar budaya yang ada di Provinsi Jambi, diantaranya yaitu pameran benda-benda purbakala di moment-moment tertentu misalnya dihari ulang tahun Provinsi Jambi, hari ulang tahun purbakala, dan event-event lainnya. Kemudian beberapa waktu yang lalu diadakan lomba vlog dengan tema “Merawat Cagar Budaya”, dalam acara lomba vlog ini peserta dengan mengangkat konten tentang cagar budaya dan objek diduga cagar budaya (ODCB) yang berada di wilayah kerja BPCB Jambi yang kemudian diposting melalui akun youtube.

3. Bimbingan Teknis

Peningkatan kinerja salah satunya dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusai yang terlibat langsung dalam pengelolaan benda cagar budaya, yaitu kegiatan

rutin berupa bimbingan teknis, seperti yang baru ini dilaksanakan di Bengkulu. Bimtek ini ditujukan untuk upgrade hard skill dan soft skill semua Juru Pelihara, Satpam hingga Tenaga Kebersihan dengan mengutamakan pelayanan sepenuh hati, pengamanan dan pelayanan kepada pengunjung seperti rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan ketika mengunjungi benda cagar budaya. Selain itu, bimbingan teknis yang dilaksanakan diharapkan mampu mengasah dan merubah mindset pengelola tentang konsep perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang implikasinya bermanfaat langsung untuk pariwisata dengan catatan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal sekitar. Kegiatan bimtek ini kedepan dengan di-update-nya pengetahuan semua stakeholders yang terlibat dengan beberapa aktifitas yang dapat melanggar UU Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tidak terjadi di Provinsi Jambi. Sehingga cagar budaya yang sudah ada dapat terpelihara dengan baik agar bukan hanya cerita sejarah bisa kita berikan kepada generasi berikutnya tentang kekayaan cagar budaya aka tetapi bukti nyata sejarah, serta diharapkan kajian-kajian ilmiah tentang sejarah Provinsi Jambi terus tergali, terpelihara dan dilestarikan.

Kesimpulan

Pemerintah kota Jambi melalui Balai pelestarian benda cagar budaya, terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya baik dari segi kuantitas, kualitas, dan keefektifan kebijakan yang direalisasikan dalam hal peningkatan dan terjaganya kelestarian cagar budaya di Provinsi Jambi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan loka masyarakat sekitar. Secara garis besar yaitu dengan dengan pendataan konservasi, Branding BPCB dengan pameran purbakala dan lombavlog purbakala, bimbingan teknis dan FGD, serta pemugaran yang tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi semata (pendapatan daerah) tetapi lebih dari itu yaitu memelihara peninggalan sejarah yang dapat terwariskan sampai generasi selanjutnya, sebagai bukti peradaban jejak Provinsi Jambi.

Daftar Pustaka

- Astiyanto, Heni. (2000). *Filsafat Jawa: Menggali butir-butir kearifan local*. Yogyakarta: Warta Pustaka.
- Akbar, Andi. M., dan Syarifuddin. (2007). *Human Capital Management*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.

- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. (2012). UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Beserta Penjelasannya, Yogyakarta.
- David, J Hunger, Thomas L.W. (2001). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Pusaka, 1995. UU RI NO.5 Thn. 1995 Tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya. Yogyakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud.
- Fred, R, David. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep-konsep (Edisi Kesembilan)*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Koentjaraningrat, (1974). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Saifudin, Azwar. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saptomo, Ade. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiharta, Sri. (2012). *Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gajah Mada, Vol 15, No 3. p. 232-245.